

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Munzir Phonna *¹
Nasrullah Hidayat ²
Alawi Parlindungan Hasibuan ³
Eliza Handayani Lubis ⁴
Jelita Simanungkalit ⁵
Siti Naila Rahmi ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Medan

*e-mail: munzir.phonna@gmail.com, nasrullah@unimed.ac.id,
alawihasyuan6969@gmail.com, elizahandayani48@gmail.com, jelitafebiola14@gmail.com,
nailarahmii119@gmail.com

Abstrak

Provinsi Sumatera Utara tengah memasuki fase bonus demografi yang signifikan, ditandai dengan 67,27 persen dari total 15,47 juta penduduknya berada pada usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius apabila tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis strategi yang telah dijalankan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi bonus demografi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengimplementasikan lima strategi utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan melalui penguatan vokasi dan perluasan Balai Latihan Kerja; (2) peningkatan kualitas kesehatan dan penurunan prevalensi stunting dari 21,1 persen menjadi 18,9 persen; (3) pengembangan ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja melalui penarikan investasi dan penguatan UMKM; (4) penguatan program keluarga berencana dan pengendalian pertumbuhan penduduk; serta (5) pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendorong transformasi digital. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, tingginya pengangguran usia muda, persoalan kesehatan masyarakat, serta ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan memanfaatkan bonus demografi bergantung pada kualitas SDM, ketersediaan lapangan kerja, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kata Kunci : Bonus Demografi, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Sumber Daya Manusia, Strategi Pemerintah Daerah

Abstract

North Sumatra Province is currently experiencing a significant demographic dividend phase, with 67.27 percent of its 15.47 million population falling within the productive age group (15–64 years). This condition presents a strategic opportunity to accelerate regional economic growth, yet also poses serious challenges if not managed through well-targeted policies. This study aims to examine and analyze the strategies implemented by the Regional Government of North Sumatra Province in addressing the demographic dividend to promote inclusive and sustainable regional economic growth. A qualitative research method with a descriptive approach was employed through a literature review of scientific journals, government reports, and relevant prior studies. The findings indicate that the regional government has implemented five main strategies: (1) improving the quality of education and skills through vocational strengthening and expansion of job training centers; (2) enhancing public health quality and reducing stunting prevalence from 21.1 percent to 18.9 percent; (3) developing employment opportunities and creating jobs through investment attraction and small and medium enterprise (SME) empowerment; (4) strengthening family planning programs and population growth control; and (5) leveraging technology and innovation to drive digital transformation. Nevertheless, several challenges remain, including the competency gap between the workforce and industry needs, high youth unemployment rates, ongoing public health concerns, and infrastructure disparities across regions. This study concludes that the successful utilization of the demographic dividend depends on the quality of human resources, the availability of employment, and cross-sector collaboration among the government, private sector, and the broader community.

Keywords: Demographic Dividend, Regional Economic Growth, Human Resources, Regional Government Strategy

PENDAHULUAN

Indonesia sedang menikmati periode bonus demografi, yaitu saat proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibanding kelompok non-produktif (anak di bawah 15 tahun dan lansia di atas 65 tahun). Bappenas (2017) memperkirakan puncak bonus demografi terjadi pada 2030–2040, dengan penduduk usia produktif mencapai sekitar 64 persen dari total proyeksi 297 juta jiwa. Kondisi ini merupakan peluang langka dalam proses pembangunan bangsa dan harus dimanfaatkan secara optimal.

Namun, bonus demografi tidak otomatis menjamin kemakmuran. Tanpa kebijakan yang tepat, kondisi ini bisa menjadi beban jika banyak angkatan kerja produktif menghadapi pengangguran, keterampilan rendah, atau layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai. Konoras dkk. (2018) menekankan perlunya kebijakan cepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bonus demografi tidak berbalik menjadi masalah pembangunan.

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi terpadat di Indonesia, menempati posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berdasarkan BPS (2024), jumlah penduduk Sumatera Utara sekitar 15,47 juta jiwa, dengan 67,27 persen berada dalam usia produktif. Ini menandakan provinsi tersebut sudah memasuki fase bonus demografi yang signifikan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Meski potensinya besar, Sumatera Utara menghadapi sejumlah kendala. Tingkat pengangguran terbuka masih 5,60 persen, dengan pengangguran tertinggi di kelompok usia 15–24 tahun mencapai 18 persen (BPS, 2024). Masalah lain termasuk stunting, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum memadai, kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, serta terbatasnya lapangan kerja formal. Ningsi dan Lubis (2025) menunjukkan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri sebagai salah satu hambatan utama sehingga banyak lulusan kesulitan mendapat pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai langkah strategis: meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, menurunkan angka stunting, menguatkan program keluarga berencana, memperluas lapangan kerja, serta memanfaatkan teknologi digital. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM agar lebih kompetitif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis strategi yang telah dijalankan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) melebihi kelompok non-produktif (0–14 tahun dan >65 tahun). Kondisi ini menurunkan rasio ketergantungan, sehingga setiap pekerja menanggung lebih sedikit orang yang tidak bekerja. Jika penduduk usia produktif berkualitas dan tersedianya lapangan kerja memadai, bonus demografi membuka peluang percepatan pertumbuhan ekonomi (Ningsi & Lubis, 2025).

Mukri (2018) menyatakan bonus demografi adalah fenomena yang hanya muncul sekali dalam sejarah bangsa. Tanpa kebijakan tepat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, peluang ini bisa terlewat dan menimbulkan masalah sosial-ekonomi yang lebih berat. Sebaliknya, negara yang berhasil memanfaatkannya dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

Umar (2017) mengingatkan bahwa bonus demografi juga menuntut pengelolaan sumber daya alam yang baik di era otonomi daerah. Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan agar tenaga kerja produktif dapat berkontribusi pada pengelolaan potensi daerah, termasuk di Sumatera Utara yang kaya akan sumber daya pertanian dan perkebunan.

Kebijakan Publik dalam Menghadapi Bonus Demografi

Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial. Dalam konteks bonus demografi, kebijakan yang terencana dan tepat sasaran menjadi kunci agar peluang demografis ini bisa dioptimalkan. Konoras dkk. (2018) mengidentifikasi tiga masalah utama: rendahnya kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, dan tingginya pengangguran di kalangan usia produktif.

Nugroho (2019) menegaskan setiap daerah perlu kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan keunggulan lokal. Pendekatan satu ukuran untuk semua tidak efektif karena perbedaan karakteristik demografis, ekonomi, dan sosial antar provinsi. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun strategi yang spesifik dan kontekstual.

Peran Pendidikan dan Keterampilan dalam Optimalisasi Bonus Demografi

Pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan daerah memanfaatkan bonus demografi. Satiti (2019) menyimpulkan pemerintah harus memprioritaskan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Tanpa itu, lonjakan penduduk produktif justru menambah beban pengangguran.

Ningsi dan Lubis (2025) menyoroti bahwa pendidikan formal di Sumatera Utara belum sepenuhnya mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, serta perluasan Balai Latihan Kerja (BLK) ke tingkat kabupaten/kota diperlukan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan secara merata.

Kesehatan dan Penurunan Stunting sebagai Fondasi Bonus Demografi

Kesehatan publik adalah fondasi pembangunan SDM produktif. Stunting menjadi perhatian karena anak yang mengalami gangguan pertumbuhan berisiko mengalami keterbatasan fisik dan kognitif yang menurunkan produktivitas di masa depan. Pemprov Sumut melalui berbagai intervensi berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,1 persen menjadi 18,9 persen (Pemprov Sumut, 2025).

Bappenas (2017) menegaskan bonus demografi hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi bila didukung SDM yang sehat dan berkualitas. Investasi di kesehatan sejak dini, termasuk pemenuhan gizi anak dan perluasan layanan kesehatan dasar, adalah langkah strategis yang harus dijalankan pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu

Ningsi dan Lubis (2025) dalam studi Optimalisasi Bonus Demografi Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara (NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12 No. 7) menyimpulkan optimasi bonus demografi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM, layanan kesehatan, dan akses publik. Penelitian itu juga menekankan pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi sebagai pendorong pertumbuhan daerah.

Purwanti dan Prasetyanto (2022) menganalisis dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan data 1990–2020 dan menemukan bahwa bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan rasio ketergantungan bersama-sama berkontribusi positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menegaskan kualitas SDM sebagai variabel kunci dalam memetik manfaat ekonomi dari bonus demografi.

Ranughaor (2021) dalam skripsinya tentang kebijakan Pemerintah Kota Malang menyimpulkan bahwa kebijakan yang meningkatkan mutu SDM adalah kunci agar bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan. Temuan ini relevan karena menunjukkan bonus demografi adalah tantangan di tingkat daerah, bukan hanya nasional.

Satyahadewi, Amir, dan Hendrianto (2023) dalam kajiannya tentang proyeksi peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan bonus demografi hingga 2040 (Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora) menyimpulkan pendidikan berkualitas dan kerja sama kuat antara industri dan lembaga pendidikan menjadi kunci agar lulusan memiliki keterampilan sesuai tuntutan dunia kerja masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis secara mendalam bagaimana potensi bonus demografi di Sumatera Utara dapat

dioptimalkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui kajian mendalam berbasis studi pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi bonus demografi, mencakup berbagai program, kebijakan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai modal pembangunan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema bonus demografi dan pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Bonus Demografi di Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara kini tengah berada dalam fase bonus demografi, yang tercermin dari semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja dibandingkan mereka yang belum atau tidak lagi produktif secara ekonomi. Situasi ini merujuk pada kondisi di mana kelompok penduduk berusia 15 hingga 64 tahun mendominasi struktur kependudukan dibandingkan kelompok anak-anak maupun lansia. Jika dikelola dengan kebijakan yang tepat sasaran, kondisi ini berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Sumatera Utara pada tahun 2024 mencapai sekitar 15,47 juta jiwa, dengan 67,27 persen di antaranya tergolong usia produktif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada di angka 71,2 persen, dengan total angkatan kerja sebanyak 8,18 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,72 juta jiwa sudah memiliki pekerjaan, sementara lebih dari 473 ribu jiwa masih belum terserap ke pasar kerja. Perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,03 persen pada tahun yang sama, dengan tingkat kemiskinan mencapai 7,19 persen. Data-data ini mencerminkan besarnya potensi demografis yang dimiliki Sumatera Utara sebagai modal pembangunan ekonomi.

Fenomena ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperbaiki taraf hidup masyarakat. Namun demikian, bonus demografi tidak dengan sendirinya membawa kemajuan jika tidak disertai oleh kualitas SDM yang memadai, ketersediaan lapangan kerja yang cukup, serta layanan publik yang berkualitas. Karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penduduk usia produktif tersebut.

4.2 Strategi Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Bonus Demografi

A. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan

Penelitian ini menemukan bahwa langkah prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyikapi bonus demografi adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa pengembangan SDM melalui pendidikan bermutu, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan perluasan akses belajar bagi masyarakat menjadi salah satu agenda utamanya. Pendekatan ini selaras dengan Teori Modal Manusia yang memandang pendidikan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kapasitas tenaga kerja sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Sri Ayu Ningsi dan Irsyad Lubis (2025) dalam kajiannya menyoroti bahwa tantangan terbesar di Sumatera Utara terletak pada kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan nyata dunia industri. Banyak pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keahliannya belum sesuai standar pasar. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, program peningkatan dan pengalihan keterampilan, serta perluasan jangkauan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi kebutuhan yang mendesak.

Temuan ini turut didukung oleh penelitian Vianey Ranughaor (2021) yang menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan kunci utama dalam mengubah bonus demografi menjadi peluang pembangunan yang berkelanjutan.

B. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Penurunan Stunting

Strategi berikutnya yang dijalankan adalah penguatan sektor kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan kesehatan sebagai prioritas dalam menyongsong bonus demografi, yang diwujudkan melalui perbaikan layanan kesehatan dasar, upaya pencegahan stunting, serta peningkatan status gizi masyarakat.

Stunting mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas generasi masa depan. Anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan ini berisiko menghadapi keterbatasan fisik maupun intelektual yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas mereka saat memasuki usia kerja.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil menekan angka prevalensi stunting hingga mencapai 18,9 persen melalui serangkaian program intervensi kesehatan, pendampingan keluarga, serta penguatan fasilitas kesehatan masyarakat. Di samping itu, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga juga diperkuat demi meningkatkan kualitas generasi yang akan datang.

Strategi ini sejalan dengan pandangan Bappenas yang menyatakan bahwa bonus demografi hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila ditopang oleh SDM yang sehat dan berkualitas.

C. Pengembangan Ketenagakerjaan dan Penciptaan Lapangan Kerja

Keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya memperluas peluang kerja melalui penarikan investasi, pengembangan sektor industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja baru.

Data menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara dengan kontribusi sekitar 2,56 juta jiwa atau 33,18 persen dari total tenaga kerja. Sektor perdagangan menyerap 19,85 persen, sementara industri pengolahan menyerap 9,14 persen tenaga kerja.

Kendati demikian, pengangguran—khususnya di kalangan usia muda—masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi tenaga kerja produktif belum terserap secara optimal. Karena itu, sinergi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan industri perlu terus diperkuat demi menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih luas dan berkelanjutan.

D. Penguatan Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menjalankan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk melalui penguatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Bersama BKKBN, berbagai program dilaksanakan, antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), dan sejumlah inisiatif pembangunan keluarga lainnya.

Program-program tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Pengendalian jumlah penduduk yang efektif diyakini mampu menjaga rasio ketergantungan tetap rendah sehingga peluang bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menekankan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan langkah strategis agar bonus demografi tidak berbalik menjadi beban pembangunan akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak produktif.

E. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, penguasaan teknologi menjadi salah satu strategi krusial dalam mengoptimalkan bonus demografi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan transformasi digital melalui peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif, serta integrasi teknologi dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik.

Sri Ayu Ningsi dan Irsyad Lubis (2025) menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan menuntut tenaga kerja untuk menguasai keterampilan baru, seperti kemampuan digital, berpikir kritis, komunikasi yang efektif, dan kerja sama tim. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi muda agar adaptif dan kompetitif di era digital merupakan keharusan yang tidak bisa diabaikan.

4.3 Tantangan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Bonus Demografi

Meskipun berbagai upaya telah dijalankan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

1. Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Industri
Masih ada jurang yang cukup lebar antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha, sehingga banyak lulusan yang belum siap bersaing di pasar kerja.
2. Tingginya Pengangguran di Kalangan Usia Muda
Angka pengangguran pada kelompok usia muda masih tergolong tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, yang menandakan bahwa potensi bonus demografi belum dimanfaatkan secara penuh.
3. Persoalan Stunting dan Kesehatan Masyarakat
Meski prevalensi stunting telah berkurang, tantangan di bidang kesehatan masyarakat masih terus membayangi upaya pembentukan SDM yang produktif dan berdaya saing.
4. Ketimpangan Infrastruktur dan Akses Layanan Publik
Kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menyebabkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja belum tersebar secara merata.

Pembahasan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis dalam merespons bonus demografi, meliputi penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta adopsi teknologi dan inovasi.

Temuan ini selaras dengan Teori Modal Manusia yang dikemukakan Todaro dan Smith (2015), yang menyatakan bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam mengkapitalisasi bonus demografi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan endogen Romer (1990) juga memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, inovasi, dan teknologi mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan demikian, fokus pemerintah pada pengembangan kompetensi tenaga kerja dan transformasi digital merupakan pilihan kebijakan yang tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Lebih lanjut, temuan ini mendukung hasil kajian Sri Ayu Ningsi dan Irsyad Lubis (2025) yang menyimpulkan bahwa mengoptimalkan bonus demografi memerlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah nyata apabila ditopang oleh SDM berkualitas, ketersediaan lapangan kerja yang memadai, serta kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, keberhasilan Provinsi Sumatera Utara dalam memanfaatkan bonus demografi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk usia produktif, melainkan juga oleh seberapa efektif pemerintah mampu meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bonus demografi di Provinsi Sumatera Utara merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Pemerintah daerah telah menjalankan lima strategi utama, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, perbaikan kesehatan dan penurunan stunting, pengembangan lapangan kerja, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan kompetensi tenaga kerja

dengan kebutuhan industri, tingginya pengangguran usia muda, masalah kesehatan masyarakat, serta ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Dengan demikian, keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja yang memadai, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (4th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2017). *Proyeksi Bonus Demografi Indonesia 2020–2035*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023–2026*. Medan: Bappeda Sumut.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025*. Medan: BPS Sumatera Utara.
- Ningsi, S. A., & Lubis, I. (2025). Optimalisasi Bonus Demografi Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 3127–3136.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Optimis Sambut Bonus Demografi, Pemprov Sumut Siapkan Dua Strategi Besar*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Pemprov Sumut Perkuat Program Keluarga dan KB, Kunci Sukses Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045*.
- Ranughaor, V. (2021). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Menghadapi Bonus Demografi Tahun 2025* (Skripsi). Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2021). *Demographic Dividend and Youth Development*. New York: UNFPA.
- Afandi, T. (2017). *Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Konoras, I. K., Wagiran, T. A., & Mukhlis, S. (2018). Problematika Pemerintah dalam Menyongsong Bonus Demografi di Indonesia. *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 22(2), 41–54.
- Mukri, S. G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, 2(6a), 51–52.
- Nugroho, D. N. A. (2019). Kebijakan dan Potensi Daerah Menghadapi Bonus Demografi Menutup (Transisi Demografi Lanjut). *Jurnal Keluarga Berencana*, 4(2), 47–55.
- Satyahadewi, N., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). Proyeksi Peningkatan Perekonomian melalui Pemanfaatan Bonus Demografi 2040. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6(2), 715–725.
- Satiti, S. (2019). Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan untuk Menyongsong Bonus Demografi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 77–92.
- Umar, M. A. (2017). Bonus Demografi sebagai Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi Daerah. *Genta Mulia*, 8(2), 90–99.
- Wardani, N. A. (2023). *Analisis Dampak Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Ranughaor, V. (2021). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Menghadapi Bonus Demografi Tahun 2025* (Skripsi). Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang.